

TESIS

**EFEKTIVITAS REKOMENDASI DPRD ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPj) KEPALA DAERAH SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***



oleh:

**KHUSWADI ROHMAN
NIM 2320215310157**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**EFEKTIVITAS REKOMENDASI DPRD
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
KEPALA DAERAH SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**KHUSWADI ROHMAN
NIM 2320215310157**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

Judul Tesis : EFEKTIVITAS REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

Nama : KHUSWADI ROHMAN

NIM : 2320215310157

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

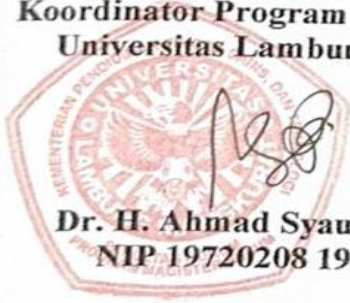
Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H
NIP 19780502 20112 2 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat,**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat,**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

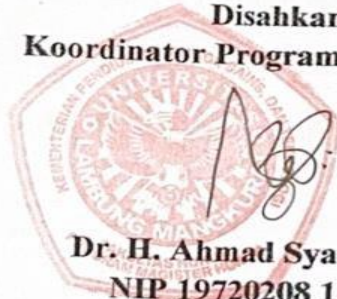
Tesis ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 22 Juli 2025

Pembimbing,




Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.
NIP 19780502 20112 2 002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Tesis ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 22 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
Sekretaris : Prof. Mirza Satria Buana, S.H, M.H, Ph.D
Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.

MOTO

"Jadilah lentera bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

"Hal terindah di dunia ini adalah ketika melihat kedua orang tua tersenyum dan mengetahui bahwa kamu adalah alasan di balik senyuman itu"

"Menang tidak selalu berarti menjadi yang pertama. Menang berarti kamu melakukan lebih baik dari yang pernah kamu lakukan sebelumnya"

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khuswadi Rohman
NIM : 2320215310157
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

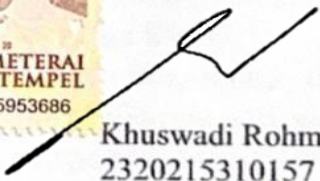
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarism.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,




Khuswadi Rohman
2320215310157

**ROHMAN, KHUSWADI. 2025. EFEKTIVITAS REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.**

RINGKASAN

Penelitian ini membahas efektivitas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sebagai bentuk fungsi pengawasan dalam mewujudkan prinsip *Good Governance*. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai prinsip otonomi daerah. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah LKPJ yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD setiap tahun. LKPJ ini menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi.

Rekomendasi DPRD atas LKPJ memiliki peran strategis untuk memastikan jalannya pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Namun, efektivitas rekomendasi tersebut dalam praktiknya seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, keterbatasan regulasi yang bersifat mengikat, serta rendahnya kualitas rekomendasi akibat keterbatasan kapasitas analisis DPRD. Hal ini berdampak pada lemahnya tindak lanjut kepala daerah terhadap rekomendasi yang diberikan, sehingga prinsip *Good Governance* belum sepenuhnya terwujud.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Data yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengkaji bagaimana prosedur penyusunan rekomendasi DPRD, isu-isu normatif yang menjadi hambatan dalam implementasinya, serta konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas rekomendasi DPRD sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi rekomendasi, dukungan data yang memadai, sinergi antara DPRD dan kepala daerah, serta adanya mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan tindak lanjut. Selain itu, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses penyusunan rekomendasi menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan DPRD.

Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan regulasi yang mewajibkan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi DPRD secara konkret, peningkatan kapasitas analisis DPRD, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fungsi pengawasan DPRD melalui rekomendasi atas LKPJ dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis prinsip *Good Governance*.

**ROHMAN, KHUSWADI. 2025. EFEKTIVITAS REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.**

ABSTRAK

Kata Kunci: pemerintahan daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rekomendasi DPRD, pengawasan, *Good Governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan perwujudan prinsip desentralisasi yang bertujuan memberikan keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu instrumen penting dalam mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang wajib disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahun. DPRD kemudian membahas dan memberikan rekomendasi atas LKPJ sebagai bentuk fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Governance*. Namun, dalam praktiknya, efektivitas rekomendasi DPRD seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi politis, kelembagaan, maupun keterbatasan regulasi yang mengikat pelaksanaan tindak lanjut oleh kepala daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah dalam mewujudkan *Good Governance*, serta mengkaji konsekuensi hukum dan administratif bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitik, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas rekomendasi DPRD sangat dipengaruhi kualitas rekomendasi, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan peran DPRD dalam fungsi pengawasan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip *Good Governance*.

ROHMAN, KHUSWADI. 2025. EFEKTIVITAS REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) KEPALA DAERAH SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H.

ABSTRACT

Keywords: regional government, Regional Head Accountability Report, DPRD recommendations, oversight, Good Governance

The administration of regional government in Indonesia embodies the principle of decentralization, aiming to grant regions the autonomy to manage and govern local community interests. One of the key instruments in the oversight mechanism of regional government performance is the Regional Head Accountability Report (LKPJ), which must be submitted annually to the Regional House of Representatives (DPRD). The DPRD then reviews and provides recommendations on the LKPJ as part of its supervisory function in realizing the principles of Good Governance. However, in practice, the effectiveness of DPRD recommendations often encounters various obstacles, including political dynamics, institutional challenges, and regulatory limitations that hinder the binding implementation of follow-up actions by regional heads. This research aims to analyze how DPRD recommendations on the LKPJ are implemented in achieving Good Governance, and to examine the legal and administrative consequences for regional heads who fail to follow up on these recommendations. Utilizing a normative juridical and descriptive-analytical approach, this study reveals that the effectiveness of DPRD recommendations is significantly influenced by the quality of the recommendations, the synergy between the executive and legislative branches, and a strong commitment to accountability and transparency principles. The findings of this research are expected to contribute both theoretically and practically to strengthening the DPRD's supervisory role and to support the creation of regional governance that is transparent, accountable, and oriented toward the principles of Good Governance.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh kerendahan hati, kuangkat tangan dan hatiku bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pemilik Ilmu, yang dengan kasihNya telah menuntun hamba menapaki jalan yang penuh pelajaran ini. Dengan berkat dan rahmatNya, hamba dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, cahaya di kegelapan zaman, yang ajarannya menjadi pelita dalam pencarian ilmu dan kebenaran. Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya menyadari bahwa perjalanan panjang selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini bukanlah hasil dari usaha pribadi semata. Tanpa dukungan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, niscaya langkah ini tidak akan sampai pada titik akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada ayah dan ibu, H. Sudjarwadi dan Hj. Chusnul Chotimah, dua nama suci yang kusebut dalam setiap doa, terima kasih untuk cinta yang tak pernah meminta balas, untuk doa yang mengalir meski tak terdengar, dan untuk restu yang selalu menjadi angin di layar perjuanganku.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Saya ucapkan terimakasih atas motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang sangat memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi dalam masa perkuliahan serta penyusunan tesis ini.
4. Kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H, M.H., segala hormat dan terima kasih saya persembahkan sebagai bentuk penghargaan atas bimbingan yang bukan hanya tentang tulisan, tetapi juga tentang ketekunan dan ketulusan. Setiap koreksi dan nasihat Ibu menjadi bagian dari pertumbuhan intelektual saya.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H, M.Hum, selaku Ketua tim penguji yang selama proses pembelajaran dan penyusunan tesis ini sangat banyak memberikan masukan dan bimbingan.
6. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H, M.H., Ph.d, selaku Sekretaris dalam susunan penguji tesis ini. Saya ucapkan terima kasih atas masukan yang konstruktif terhadap penyusunan tesis ini.
7. Para Dosen Pengajar, serta akademik di Magister Hukum Universitas Lambung mangkurat yang selama perkuliahan ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta sudah sangat membantu dalam proses penyusunan tesis ini.
8. Kepada isteri tercinta, sahabat seperjalanan dalam suka dan duka, kaulah peneduh di saat lelah, dan penopang di saat langkah terasa goyah. Dalam doamu kutemukan kekuatan, dalam senyummu kutemukan harapan.

9. Kepada rekan-rekan di kantor, khususnya di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah bersedia berbagi waktu, tugas, dan pengertian. Dukungan kalian adalah energi yang tak ternilai dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di kampus, khususnya di kelas HTN, terima kasih atas kebersamaan yang mewarnai hari-hari penuh tekanan. Dalam diskusi dan canda kalian, kutemukan makna dari sebuah perjalanan kolektif menuju tujuan yang sama.

Akhirnya, karya ini hanyalah serpihan dari ilmu yang luas tak bertepi. Namun semoga dari serpihan ini, lahir manfaat bagi siapa saja yang mencarinya, dan menjadi amal yang mengalir hingga akhir masa.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO/PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMAKASIH	
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENELITIAN	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	10
E. TINJAUAN PUSTAKA ATAU KERANGKA TEORI	11
F. METODE PENELITIAN.....	31
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN	40
BAB II.....	41
IMPLEMENTASI REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i>	41
A. Prosedur Penyusunan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.....	41
B. Isu Normatif Terhadap Hambatan Dalam Penyusunan Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Kepala Daerah.	65
BAB III.....	80
KONSEKUENSI BAGI KEPALA DAERAH YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI DPRD.....	80
A. Analisis Terhadap Ketentuan Bagi Kepala Daerah Untuk Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.....	80
B. Bentuk-bentuk Konsekuensi Yang Dapat Terjadi Dalam Hal Kepala Daerah Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD	87

BAB IV	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	